

KLIPING BERITA

Sumber : Suara NTB

05 Juli 2023

LOMBOK TENGAH

Tuntaskan Catatan BPK RI, Pemkab Loteng Diminta Tidak Lelet

BYSUARANTB.COM 5 JULI 2023



M. Tauhid (Suara NTB/kir)

Praya (Suara NTB) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng) mendorong pemerintah daerah segera menuntaskan catatan yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait pelaksanaan APBD Loteng tahun 2022. Mengingat, cukup banyak catatan BPK RI yang sejauh ini belum bisa diselesaikan oleh Pemkab Loteng.

DPRD Loteng pun menegaskan bakal mendukung semua upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam menyelesaikan sisa catatan BPK RI yang belum diselesaikan sampai sejauh ini. "BPK RI memberikan waktu 60 hari untuk menyelesaikan berbagai catatan terkait pelaksanaan APBD 2022. Kita minta pemerintah daerah bisa memanfaatkan waktu yang ada. Jangan sampai lewat dari waktu yang diberikan,"pinta Ketua DPRD Loteng, M. Tauhid, S.IP., Selasa, 4 Juli 2023.

Ditemui wartawan di kantor Bupati Loteng, Tauhid mengatakan, secara umum mengapresiasi kinerja Pemkab Loteng dalam menyelesaikan berbagai catatan BPK RI. Di mana sampai sejauh ini proses penyelesaian catatan BPK RI progresnya cukup baik. Sudah bisa mencapai hampir 70 persen.

Artinya, Pemkab Loteng bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan apa yang menjadi catatan BPK RI. Semangat inilah, ujarnya, yang diharapkan bisa terus dijaga supaya bisa menuntaskan catatan BPK RI sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan.

"Nanti kita juga akan panggil OPD (organisasi perangkat daerah) yang masih memiliki catatan BPK RI. Untuk bisa kita carikan solusi bersama penyelesaian catatan tersebut," terang Tauhid.

Disinggung catatan seperti apa yang menjadi temuan BPK RI, Tauhid mengungkapkan sesuai laporan yang diterima kebanyakan berupa kelebihan pembayaran pada proyek-proyek fisik. Terutama lagi di proyek-proyek yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Loteng, sehingga dari catatan BPK RI, Dinas PUPR menjadi OPD yang paling banyak catatannya.

Dikonfirmasi terpisah, Pelaksana Tugas (plt) Sekda Loteng, Drs. H.L. Aknal Afandi, M.Si., pihaknya tetap berusaha menyelesaikan catatan BPK RI sesuai batas waktu yang diberikan. "Rekom BPK ini menyangkut pihak ketiga atau kontraktor. Jadi sedari awal Pemkab Loteng berkomitmen dan berusaha untuk bisa menagih para pihak yang masih ada temuan. Sehingga sedapat mungkin dalam waktu 60 hari apa yang menjadi temuan bisa dikembalikan atau ditindaklanjuti,"jawabnya. **(kir)**